

BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

Catatan dalam pengisian lembar data kualifikasi (LDK)

Lembar Data Kualifikasi (LDK) diisi oleh Pokja Pemilihan sebelum menerbitkan dokumen kualifikasi. LDK berisi informasi dan ketentuan spesifik untuk proses pemilihan penyedia pada paket pengadaan yang dimaksud. Pokja Pemilihan harus mengisi informasi dalam LDK ini yang terkait Instruksi Kepada Peserta (IKP). Semua informasi harus diisi tanpa ada isian yang dikosongkan. Untuk memudahkan penyiapan LDK, penomoran klausul pada LDK disesuaikan dengan nomor klausul pada IKP.

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. UMUM

1. LINGKUP PEKERJAAN

- 1.1. Kode RUP: 35842776
- 1.2. Nama paket pengadaan: Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2022.
- 1.3. Uraian singkat paket pengadaan:
 - a. Melakukan koordinasi dengan stakeholders di 2 provinsi terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan di daerah. Adapun provinsi-provinsi tersebut, yaitu: Provinsi Sulawesi Tengah (13 kab/kota) dan Provinsi Jawa Timur (38 kab/kota).
 - b. Melakukan pengumpulan data tahun terakhir yang berkaitan dengan ketahanan nasional 51 kab/kota sesuai dengan instrumen pengukuran yang telah ditentukan Pusat Laboratorium Lemhannas.
 - c. Melaksanakan pemasukan/input data 2 provinsi basis kab/kota ke dalam aplikasi siskurtannas.
 - d. Menyusun buku profil ketahanan nasional 2 provinsi basis kab/kota.
 - e. Mengimplementasikan fitur *claim management* pada level menu, form, dan fungsi.
 - f. Pengembangan Sistem Statik yang dilakukan dengan: Menambah fitur filter model pada Form Entry Jawaban Kuesioner; Memperbaiki fitur monitoring dalam form entry jawaban kuesioner; Menu Admin – Proses yang terdiri dari: Optimasi kecepatan *loading page* dan Menambah kolom Bulan pada tampilan Daftar Proses Kalkulasi; Menghitung skor indeks pada level Aspek; Membuat fitur report indeks ketahanan per wilayah/gatra/aspek/variabel; dan Menambah parameter indikator pada report Perbandingan IKN per Wilayah.
 - g. Pengembangan Sistem Dinamik yang dilaksanakan melalui: Perbaikan keluaran indikator pada fitur dampak dan warna peta pada menu isu strategis, serta Perbaikan

redundansi indikator pada menu korelasi.

- h. Pengembangan Portal GIS yang dilakukan dengan membuat aplikasi tematik yang memuat indeks ketahanan nasional, *prime mover*, isu strategis, trend, komposisi wilayah, dan komparasi.
 - i. Sistem Integrasi Data yang dilakukan dengan: Mengimplementasikan otentikasi dan otorisasi user pada aplikasi sistem integrasi data dengan BPS dan Membuat sistem integrasi data dengan Kemdikbud (Neraca Pendidikan Daerah).
 - j. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan, yang meliputi laporan pendahuluan dan laporan akhir pekerjaan.
- 1.4. Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
 - 1.5. Nama UKPBJ: Subbag Layanan Pengadaan Bag Ruma Rum Settama Lemhannas RI.
 - 1.6. Nama Pokja Pemilihan: Pengukuran Ketahanan Nasional dan Integrasi Data Tahap VII di 2 Provinsi Basis Kab/Kota Lemhannas RI T.A. 2022.
 - 1.7. Alamat Pokja Pemilihan: Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat 10110.
 - 1.8. Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah: www.lemhannas.go.id
 - 1.9. Website UKPBJ: -
 - 1.1 Website SPSE : <https://lpse.lemhannas.go.id>

2. SUMBER DANA Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA Lemhannas RI Nomor: DIPA-064.01.1.632505/2022 tanggal 17 November 2021 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Lemhannas RI Tahun Anggaran 2022.

C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 13.2 Bentuk Data Kualifikasi | a. Syarat Kualifikasi Administrasi/ Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha <ul style="list-style-type: none">1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.<ul style="list-style-type: none">a) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).b) Surat Izin: <i>SIUP</i>c) Bidang Usaha: Jasa Piranti Lunak |
|-------------------------------------|--|

- 2) Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- 3) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 4) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk.
- 5) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - a) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi:
 - a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e) yang bertindak untuk dan atas nama badan

usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

- f) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- g) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;
- h) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.

b. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

1) Memiliki pengalaman:

- a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b) Pekerjaan yang serupa (*similar*) berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
- c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS.
- d) Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau Penyedia untuk Agen Pengadaan dari unsur

Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Badan Usaha dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 2) Memiliki sumber daya manusia:
 - a) Manajerial; dan
 - b) tenaga kerja (jika diperlukan).
- 3) Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan (jika diperlukan).

15. Pengisian Data Kualifikasi

15.1.b Data kualifikasi yang diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain:

1. _____
2. _____
3. _____dst

[*contoh: Surat Perjanjian Kemitraan, dll*]